LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA

BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

FEBRUARI 2026

Direktorat Pembangunan Jembatan
Direktorat Jenderal Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2026 dapat disusun dan diterbitkan tepat pada waktunya. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari ini merupakan sarana atau media informasi secara bertahap dalam merencanakan pencapaian kinerja selama periode Tahun 2026 dan juga merupakan perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum.

Tujuan Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari tahun 2026 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rencana aksi pelaksanaan program bulanan dan kegiatan yang telah ditetapkan didalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025 - 2029 yang setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk dokumen Rencana Kinerja Tahunan serta kegiatan yang telah ditetapkan didalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2026 Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja keluaran (*output*) dan kinerja hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dan direalisasikan pertahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bulan Februari ini didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Proyek (SIPP) Terpadu sebagai basis data yang secara sistematis tertanggal 2 Maret 2026.

Dengan disusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulan Februari tahun 2026 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus secara bertahap (bulanan), dan juga dapat menjadi bahan evaluasi atas pencapaian kinerja serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan saran serta pendampingan selama penyusunan laporan ini, disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya.

Bandung, 03 Maret 2026
Kepala Balai
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus,

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Armen Adekristi, S.T., MSCE.
NIP 198410152008011002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
DAFTAR GAMBAR iii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tugas dan Fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus 4
1.3 Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus 5
BAB II CAPAIAN KINERJA BULANAN 7
2.1 Target Kinerja Bulanan 7
2.1.1 Target *Output* Kegiatan 7
2.1.2 Target Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan 8
2.1.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Umum 8
2.1.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Perkantoran 9
2.1.5 Target Indikator Kinerja Kegiatan 9
2.1.6 Target Indikator Kinerja Output 10
2.2 CAPAIAN KINERJA BULAN FEBRUARI 11
2.2.1 Pemantauan Progres Data Kinerja 11
2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan 11
2.2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan 13
2.2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Umum 14
2.2.5. Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Perkantoran 14
2.3 Progres Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA. 2026 15
BAB III PENUTUP 19
3.1 Tindak Lanjut Terhadap Capaian Realisasi Bulan Januari 2026 19
3.2 Kendala/Permasalahan Bulan Februari 2026 19
3.3 Faktor Pendukung Keberhasilan 20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Capaian Output Kegiatan 8
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan 8
Tabel 2.3 Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Umum 9
Tabel 2.4 Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Jumlah Layanan Perkantoran 9
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus 9
Tabel 2.6 Target Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan 10
Tabel 2.7 Target Indikator Kinerja *Output* Layanan Umum 10
Tabel 2.8 Target Indikator Kinerja *Output* Layanan Perkantoran 11
Tabel 2.9 Tabel Progres Pemantauan Kinerja 11
Tabel 2.10 Target Kriteria Penilaian 12
Tabel 2.11 Target *Output* Kegiatan 12
Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan 13
Tabel 2.13 Pencapaian Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Umum 14
Tabel 2.14 Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Perkantoran 15
Tabel 3.1 Tindak Lanjut Kendala di Bulan Sebelumnya 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 6
Gambar 2.1 Progres Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA. 2026 18

BAB I
PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh Pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi Pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi:

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi Pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal Pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan yang telah direviu dan ditandatangani oleh aparat pengawasan internal Pemerintah.

Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi Pemerintah.

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata Pemerintah untuk melaksanakan *Good Governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*.

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi manajemen kinerja secara taat asas melalui penerapan seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang meliputi: Renstra, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, LAKIP dan evaluasi LAKIP. Pada tahun 2026 Renstra yang dijadikan acuan adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan tahun 2025 sebagai arah pembangunan bidang jalan dan jembatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bulanan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta atas capaian kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang merupakan salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum. Nomenklatur Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum yang sebelumnya bernama Balai Struktur Jembatan. Selanjutnya, melalui Permen PUPR Nomor 09/PRT/M/2019, dilakukan perubahan terhadap peraturan tersebut, namun tidak terdapat perubahan pada nama maupun struktur organisasi balai. Pada tahun 2020, berdasarkan Permen PUPR Nomor 26 Tahun 2020, nomenklatur balai mengalami perubahan menjadi Balai Jembatan. Pada tahun 2024, melalui Permen PUPR Nomor 9 Tahun 2024, nama tersebut dikembalikan menjadi Balai Jembatan Khusus dan Terowongan (BJKT). Namun, pada tahun 2025 bersadarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum nomenklatur balai mengalami perubahan menjadi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

1.2 Tugas dan Fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus didukung oleh unit-unit kerja yang berada dibawahnya sebagaimana tertuang dalam Bagian Kelima Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum.

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan bentang panjang dan terowongan khusus, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 133 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. penyiapan standar, prosedur, dan kriteria teknis keamanan jembatan dan terowongan khusus;
c. pelaksanaan inspeksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
d. pelaksanaan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku serta analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
e. pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
f. pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
g. pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus; dan
h. pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan internal dan manajemen risiko sesuai dengan kewenangannya, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal balai; dan
i. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik/kekayaan negara, komunikasi publik dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga didukung oleh unit-unit di bawahnya, yaitu sebagai berikut:

1) Subbagian Umum dan Tata Usaha

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian internal balai.

2) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Visi dan Misi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Visi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah:

"BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM MENYELENGGARAKAN PENGATURAN KEAMANAN JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN JALAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA: "MEWUJUDKAN KONEKTIVITAS JALAN NASIONAL YANG ANDAL DAN PRIMA DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG"

Misi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah:

1. Mewujudkan Tertib Penyelenggaraan Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan yang meliputi tahap perencanaan teknis, pelaksanaan/konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan untuk memenuhi daya layan dalam pengelolaannya;
2. Meningkatkan Keandalan Jembatan Khusus dan Terowongan Jalan, sehingga dapat mencegah atau sekurang-kurangnya mengurangi resiko kegagalan bangunan/pekerjaan konstruksi jembatan dan terowongan jalan.

1.3 Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum, struktur organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan unit kerja yang berada dibawahnya terdiri atas:

1. Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilihat dalam Gambar 1.1.

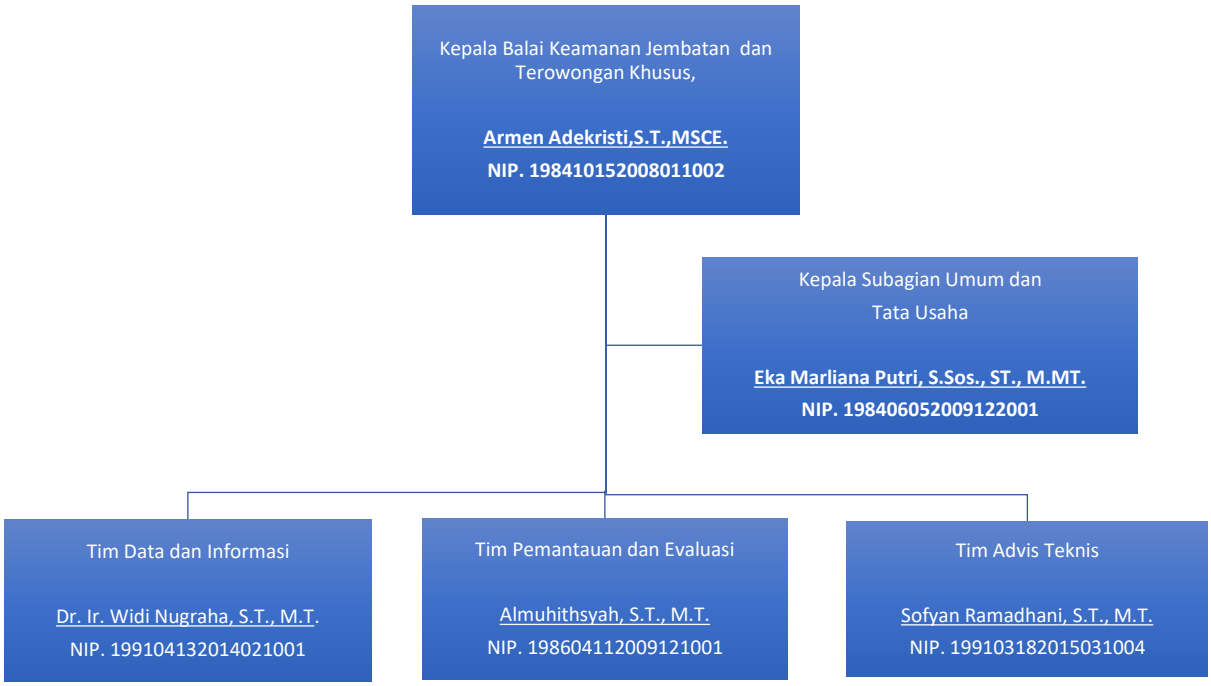

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

BAB II
CAPAIAN KINERJA BULANAN

Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Satuan Kerja dan Unit Kerja Eselon II menyusun Penetapan Kinerja setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh pimpinan unit organisasi dan pimpinan satuan kerja. Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Menilai keberhasilan organisasi.

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh unit Eselon III. Dasar penentuan target kinerja (*target setting*) antara lain:

a. Ketersediaan sumber daya yang dimiliki seperti pendanaan yang tersedia, SDM, dan peralatan;
b. Target kinerja kementerian maupun nasional; dan
c. Hasil evaluasi terhadap penetapan kinerja periode sebelumnya.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan setiap akhir periode, instansi melakukan pengukuran pencapaian target kinerja (dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja) yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

2.1 Target Kinerja Bulan Februari 2026

Pada sub bab ini ditampilkan target Bulan Februari sebagaimana tertuang pada “Rencana Aksi” dan revisinya, yang bersumber dari data pada SiPP Online.

2.1.1 Target *Output* Kegiatan

Output Kegiatan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus terdiri dari 3 *output* kegiatan. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja selama setahun di bagi perbulan. Target Capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan

presentase perkiraan pencapaian. Target pencapaian indikator kinerja tingkat kemantapan jalan nasional dapat dilihat pada **Tabel 2.1**

Tabel 2.1 Target Kinerja Bulan Februari 2026

NO	*OUTPUT* KEGIATAN	Target 2026	Satuan	Rencana Bulan ke 2 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
IKK	Tingkat Kinerja Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100	%	6,71
1	Layanan Keteknikan Bidang Jalan Dan Jembatan	1	Rekomendasi Kebijakan	6,71
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga				
IKK	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87,05	%	7,02
1	Layanan Umum	1	Layanan	39,48
2	Layanan Perkantoran	1	Layanan	5,49

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.2 Target Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja *output* layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan terdiri dari 3 paket kegiatan. Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Unit Kerja selama setahun di bagi perbulan. Target Rencana Aksi Capaian Indikator Kinerja *Output* tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan presentase perkiraan pencapaian. Target pencapaian indikator kinerja *output* jumlah layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan dapat dilihat pada **Tabel 2.2**

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

NO	PAKET KEGIATAN	TARGET FEBRUARI (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan				
1	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Dan Terowongan Jalan	4.60		
2	Advis dan Layanan Teknis Jembatan Dan Terowongan Jalan	5.60		
3	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan	8.00		

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Umum

Indikator kinerja *output* layanan dukungan manajemen satker terdiri dari 2 paket kegiatan. Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Unit Kerja selama setahun di bagi perbulan. Target Rencana Aksi Capaian Indikator Kinerja *Output* tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan presentase perkiraan pencapaian. Target pencapaian indikator kinerja *output* layanan dukungan manajemen satker dapat dilihat pada **Tabel 2.3**

Tabel 2.3 Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Umum

NO	PAKET KEGIATAN	TARGET FEBRUARI (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Layanan Umum				
1	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan	89.00		
2	Pengelolaan Kepegawaian	0.00		
3	Penyelenggaraan Zona Integritas, Manajemen Resiko Dan Smap	0.80		

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.4 Target Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Perkantoran

Indikator kinerja *Output* layanan perkantoran terdiri dari 5 paket kegiatan. Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Unit Kerja selama setahun di bagi perbulan. Target Rencana Aksi Capaian Indikator Kinerja *Output* tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan presentase perkiraan pencapaian. Target pencapaian indikator kinerja *Output* layanan perkantoran dapat dilihat pada **Tabel 2.4**

Tabel 2.4 Target Capaian Indikator Kinerja *Output* Jumlah Layanan Perkantoran

NO	PAKET KEGIATAN	TARGET FEBRUARI (%)		KETERANGAN
		AWAL	REVISI	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Layanan Perkantoran				
1	Uang Makan PNS dan PPPK	6.22		
2	Operasional Perkantoran	2.79		
3	Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya	7.22		
4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.40		

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.5 Target Indikator Kinerja Kegiatan

Pelaksanaan Rencana Strategis dituangkan dalam target kinerja tahunan agar dapat dieksekusi sampai dengan tingkat *output* dan kinerja *output*-nya. Target kinerja ini disampaikan pada perjanjian kinerja unit eselon II, berikut uraian target indikator kinerja kegiatan dan kinerja *output*.

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET (2026)
Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan		IKP: Tingkat efektivitas proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	
		Parameter: Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyenggaraan jalan dan jembatan	
		IKK: Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100%
		Output Renstra:	
		Rincian Output:	

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET (2026)
	ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1,00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya		IKP: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)	
		Parameter: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknik Lainnya (DJBM)	
		IKK: Tingkat Kinerja Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87,05%
		Output Renstra:	
		Rincian Output:	
	EBA 962	Layanan Umum	1,00 Layanan
	EBA 994	Layanan Perkantoran	1,00 Layanan

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.1.6 Target Indikator Kinerja Output

Target Indikator Kinerja *Output* Bulan Februari merupakan penjabaran dari indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja TA 2026. Indikator kinerja *ouput* layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan terdiri dari 3 indikator, indikator kinerja *output* untuk layanan umum terdiri dari 3 indikator, indikator kinerja *output* untuk layanan perkantoran terdiri dari 4 indikator. Target indikator kinerja kegiatan setiap indikator-indikator program Bulan Februari 2026 pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dapat dilihat pada **Tabel 2.6 – 2.8**

Tabel 2.6 Target Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

No.	INDIKATOR KINERJA *OUTPUT*	SATUAN	TARGET 2026	
			AWAL	REVISI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Tingkat Pencapaian Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan				
Layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan				
1.	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan Dan Terowongan Jalan	Laporan	1,00	
2.	Advis dan Layanan Teknis Jembatan Dan Terowongan Jalan	Laporan	1,00	
3.	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan	Laporan	1,00	

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

Tabel 2.7 Target Indikator Kinerja *Output* Layanan Umum

No.	INDIKATOR KINERJA *OUTPUT*	SATUAN	TARGET 2026	
			AWAL	REVISI
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga				
Layanan Umum				
1.	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan	Laporan	1,00	

No.	INDIKATOR KINERJA *OUTPUT*	SATUAN	TARGET 2026	
			AWAL	REVISI
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga				
Layanan Umum				
2.	Pengelolaan Kepegawaian	Laporan	1,00	
3.	Penyelenggaraan Zona Integritas, Manajemen Risiko, dan SMAP	Laporan	1,00	

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra Bina Marga 2025-2029, dan SIPP

Tabel 2.8 Target Indikator Kinerja *Output* Layanan Perkantoran

No.	INDIKATOR KINERJA *OUTPUT*	SATUAN	TARGET 2026	
			AWAL	REVISI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga				
Layanan Perkantoran				
1.	Uang Makan PNS dan PPPK	Laporan	1,00	
2.	Operasional Perkantoran	Laporan	1,00	
3.	Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya	Laporan	1,00	
4.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Laporan	1,00	

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

Target Kinerja Bulan Februari tersebut menguraikan tentang proses pencapaian target paket kegiatan yang digambarkan dengan presentase perkiraan pencapaian ataupun rencana pencapaian target Bulan Februari baik untuk indikator kinerja program maupun paket kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Aksi.

2.2 Capaian Target Bulanan

2.2.1 Pemantauan Progres Data Kinerja

Pada sub bab ini dilaporkan progres data kinerja yang turut dilaporakan dalam e-Sakip

Tabel 2.9 Tabel Progres Pemantauan Kinerja

NO	KEGIATAN/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGET 2026	RENCANA BULANAN (Rencana Aksi) (%)	RENCANA BULAN FEBRUARI	REALISASI BULAN FEBRUARI	KINERJA BULANAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	6.71	6.71	6.99	104.21
1	Tingkat dukungan manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	87.05	7.02	7.02	7.08	100.87

2.2.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk memperoleh gambaran mengenai tercapai atau tidaknya target bulanan, maka dilakukan pengukuran sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2021 tenggang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(**Tabel 2.10**). Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian diisikan ke dalam kolom evaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan/kegagalan indikator kinerja perbulan yang dilaporkan.

Tabel 2.10 Target Kriteria Penilaian

No.	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	
2.	A	>80 – 90	Memuaskan	
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik	
4.	B	>60 – 70	Baik, perlu sedikit perbaikan	
5.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar	
6.	C	>30 – 50	Kurang, perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar	

Target yang ditetapkan dalam tabel berikut merupakan target penyelesaian proses pelaksanaan fisik di lapangan (progress pencapaian *output*). Realisasi capaian kinerja *output*, merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja paket kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon III. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut pada bulan selanjutnya. Target pencapaian ouput kegiatan dapat dilihat pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2.11 Target *Output* Kegiatan

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ *OUTPUT*	TARGET 2026	PAGU (RP. RIBU)	REALISASI (RP. RIBU)	BULAN FEBRUARI					
						KEUANGAN		FISIK			
						RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	7698.ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1	5.690.182	397.803	10,77	6,99	6,71	6,99	104.21	
2	7756.EBA.962	Layanan Umum	1	123.958	49.183	6,93	39,68	39,48	39,68	100.48	
3	7756.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	2.625.501	145.566	7,33	5,54	5,49	5,54	101.00	
		Paket Kegiatan Yang Mengalami Kendala/Permasalahan; - Rencana Tindak; -									
		Paket kegiatan yang sudah PHO/Diresmikan; -									

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra Bina Marga 2025-2029, dan SIPP

2.2.3 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

Target yang ditetapkan dalam tabel berikut merupakan target penyelesaian proses pelaksanaan fisik di lapangan (progress pencapaian *output*). Realisasi capaian kinerja *output*, merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja paket kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon III. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut pada bulan selanjutnya. Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan dapat dilihat pada **Tabel 2.12**

Tabel 2.12 Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ *OUTPUT*	TARGET	PAGU (RP. RIBU)	REALISASI (RP. RIBU)	BULAN FEBRUARI					
						KEUANGAN		FISIK			
						RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	7698.ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan									
1	04.693803.GA.7698.ABF.001.404.AA	Pemantauan Dan Evaluasi Jembatan Dan Terowongan Jalan	1	1.821.054	83.798	3,52	4,60	4,60	4,60	100.00	
2	04.693803.GA.7698.ABF.001.404.AB	Advis Dan Layanan Teknis Jembatan Dan Terowongan Jalan	1	484.529	26.952	6,42	5,56	5,60	5,56	99.29	
3	04.693803.GA.7698.ABF.001.405.AA	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan	1	3.384.599	287.053	15,30	8,48	8,00	8,48	106.00	
		Paket Kegiatan Yang Mengalami Kendala/Permasalahan; - Rencana Tindak; -									
		Paket kegiatan yang sudah PHO/Diresmikan; -									
		Dokumentasi : 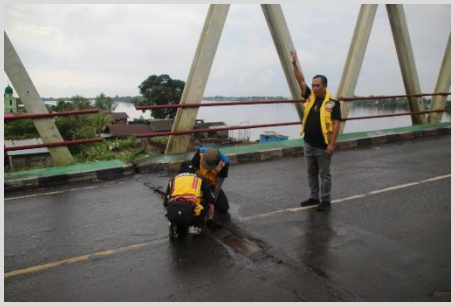 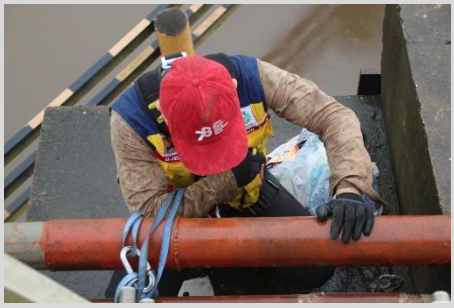									

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.2.4 Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Umum

Target yang ditetapkan dalam tabel berikut merupakan target penyelesaian proses pelaksanaan fisik di lapangan (progress pencapaian *output*). Realisasi capaian kinerja *output*, merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja paket kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon III. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut pada bulan selanjutnya. Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Umum dapat dilihat pada **Tabel 2.13**

Tabel 2.13 Pencapaian Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Umum

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ *OUTPUT*	TARGET	PAGU (RP. RIBU)	REALISASI (RP. RIBU)	BULAN FEBRUARI					
						KEUANGAN		FISIK			
						RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	7756.EBA.962	Layanan Umum									
1	04.693803.WA.7756.EBA.962.235.AD	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan	1	54.403	48.636	6,93	89,40	89,00	89,40	100.45	
2	04.693803.WA.7756.EBA.962.235.AE	Pengelolaan Kepegawaian	1	3.811	0	6,93	0,00	0,00	0,00	0	
3	04.693803.WA.7756.EBA.962.235.AF	Penyelenggaraan Zona Integritas, Manajemen Resiko dan SMAP	1	65.744	547	6,93	0,83	0,80	0,83	103.75	
		Paket Kegiatan Yang Mengalami Kendala/Permasalahan; - Rencana Tindak; -									
		Paket kegiatan yang sudah PHO/Diresmikan -									
		Dokumentasi : 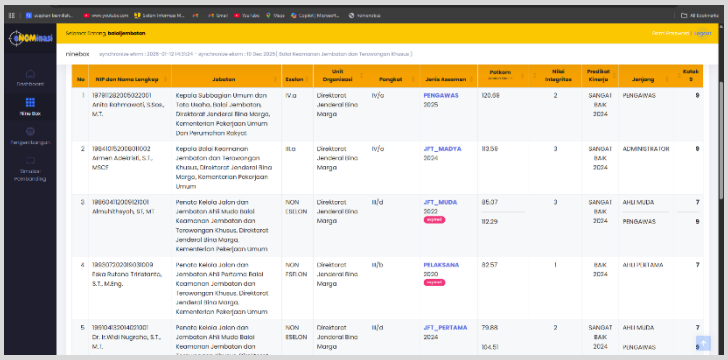									

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2026, Renstra BKJTK 2025-2029, dan SIPP

2.2.5. Pencapaian Indikator Kinerja Layanan Perkantoran

Target yang ditetapkan dalam tabel berikut merupakan target penyelesaian proses pelaksanaan fisik di lapangan (progress pencapaian *output*). Realisasi capaian kinerja *output*, merupakan agregat dari realisasi capaian kinerja paket kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Kerja Eselon III. Adapun kemajuan kegiatan lengkap dengan

uraian permasalahan maupun langkah tindak lanjut yang dilakukan untuk meminimalisir permasalahan tersebut pada bulan selanjutnya. Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Perkantoran dapat dilihat pada **Tabel 2.14**

Tabel 2.14 Pencapaian Indikator Kinerja *Output* Layanan Perkantoran

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ *OUTPUT*	TARGET	PAGU (RP. RIBU)	REALISASI (RP. RIBU)	BULAN FEBRUARI					
						KEUANGAN		FISIK			
						RN (%)	RL (%)	RN (%)	RL (%)	KINERJA (%)	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	7756.EBA.994	Layanan Perkantoran									
1	04.693803.WA.7756.EBA.994.001.AG	Uang Makan Dan Lembur PNS Dan PPPK	1	330.060	21.541	6,22	6,53	6,22	6,53	104.98	
2	04.693803.WA.7756.EBA.994.002.AH	Operasional Perkantoran	1	269.060	7.720	7,14	2,87	2,79	2,87	102.87	
3	04.693803.WA.7756.EBA.994.002.AI	Langganan Daya Dan Jasa Operasional Lainnya	1	1.505.939	108.793	8,20	7,22	7,22	7,22	100.00	
4	04.693803.WA.7756.EBA.994.002.AJ	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Kantor	1	520.442	7.511	5,63	1,44	1,40	1,44	102.86	
		Paket Kegiatan Yang Mengalami Kendala/Permasalahan; - Rencana Tindak; -									
		Paket kegiatan yang sudah PHO/Diresmikan -									
		Dokumentasi : 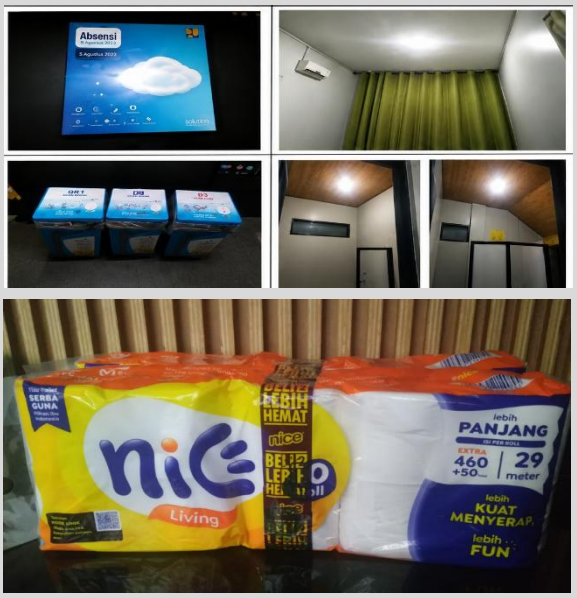 									

2.3 Uraian Singkat Paket Pekerjaan

Uraian paket paket pekerjaan mulai dari penjelasan paket, progres/capaian, permasalahan/kendala, rencana tindak lanjut serta foto-foto terbaru, yang meliputi

2.3.1 Paket ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

1. Progress dan Foto/Dokumentasi

   Pada bulan Februari 2026 progress yang dicapai Paket ABF 001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan adalah 6,99% dari rencana 6,71% (Kinerja 104,21%).

2. Permasalahan
   Tidak ada permasalahan pada paket ini karena mendapatkan penilaian kinerja AA/Sangat Memuaskan.
3. Rencana Tindak Lanjut
   Karena mendapatkan penilaian kinerja AA/Sangat Memuaskan sehingga tidak membutuhkan Rencana Tindak Lanjut.

2.3.2 Paket EBA 962 Layanan Umum

1. Progress dan Foto/Dokumentasi
   Pada bulan Februari 2026 progress yang dicapai Paket EBA 962 Layanan Umum adalah 39,68% dari rencana 39,48% (Kinerja 100,48%).

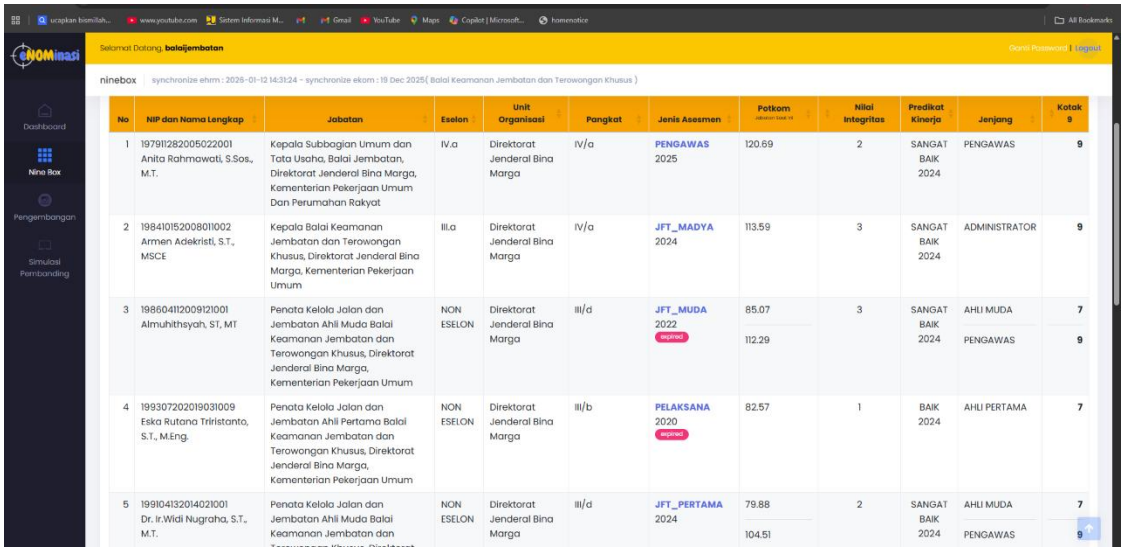

Selamat Datang, **balaijembatan**

ninebox | synchronize ehrm : 2026-01-12 14:31:24 - synchronize ekom : 19 Dec 2025(Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus)

No	NIP dan Nama Lengkap	Jabatan	Eselon	Unit Organisasi	Pangkat	Jenis Asesmen	Potkom	Nilai Integritas	Predikat Kinerja	Jenjang	Kotak 9
1	197911282005022001 Anita Rahmawati, S.Sos., M.T.	Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Balai Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	IV.a	Direktorat Jenderal Bina Marga	IV/a	PENGAWAS 2025	120.69	2	SANGAT BAIK 2024	PENGAWAS	9
2	198410152008011002 Armen Adekristi, S.T., MSCE	Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum	III.a	Direktorat Jenderal Bina Marga	IV/a	JFT_MADYA 2024	113.59	3	SANGAT BAIK 2024	ADMINISTRATOR	9
3	198604112009121001 Almuhithsyah, ST, MT	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum	NON ESELON	Direktorat Jenderal Bina Marga	III/d	JFT_MUDA 2022 expired	85.07 112.29	3	SANGAT BAIK 2024	AHLI MUDA PENGAWAS	7 9
4	199307202019031009 Eska Rutana Triristanto, S.T., M.Eng.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum	NON ESELON	Direktorat Jenderal Bina Marga	III/b	PELAKSANA 2020 expired	82.57	1	BAIK 2024	AHLI PERTAMA	7
5	199104132014021001 Dr. Ir.Widi Nugraha, S.T., M.T.	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Balai Keamanan Jembatan dan	NON ESELON	Direktorat Jenderal Bina Marga	III/d	JFT_PERTAMA 2024	79.88 104.51	2	SANGAT BAIK 2024	AHLI MUDA PENGAWAS	7 9

2. Permasalahan
   Tidak ada permasalahan pada paket ini karena mendapatkan penilaian kinerja AA/Sangat Memuaskan.
3. Rencana Tindak Lanjut
   Karena mendapatkan penilaian kinerja AA/Sangat Memuaskan sehingga tidak membutuhkan Rencana Tindak Lanjut.

2.3.3 Paket EBA 994 Layanan Perkantoran

1. Progress dan Foto/Dokumentasi
   Pada bulan Februari 2026 progress yang dicapai Paket EBA 994 Layanan Perkantoran adalah 5,54% dari rencana 5,49% (Kinerja 101,00%).

2. Permasalahan
   Tidak ada permasalahan pada paket ini karena mendapatkan penilaian kinerja AA/Sangat Memuaskan.

3. Rencana Tindak Lanjut
   Karena mendapatkan penilaian kinerja AA/Sangat Memuaskan sehingga tidak membutuhkan Rencana Tindak Lanjut.

2.4 Progres Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA. 2025

Evaluasi SAKIP dilaksankan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartue Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga. Mendukung tujuan penyelenggaraan evaluasi SAKIP pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang meliputi evaluasi atas proses/penerapan SAKIP, evaluasi atas keluaran (output) dan evaluasi atas hasil (outcome).

Pada bulan Februari 2026, progress rencana tindak lanjut evaluasi SAKIP TA 2025 adalah penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) oleh Evaluator pada Web E-Sakip V3, terlihat pada **Gambar 2.1.**

Gambar 2.1 Progres Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA. 2026

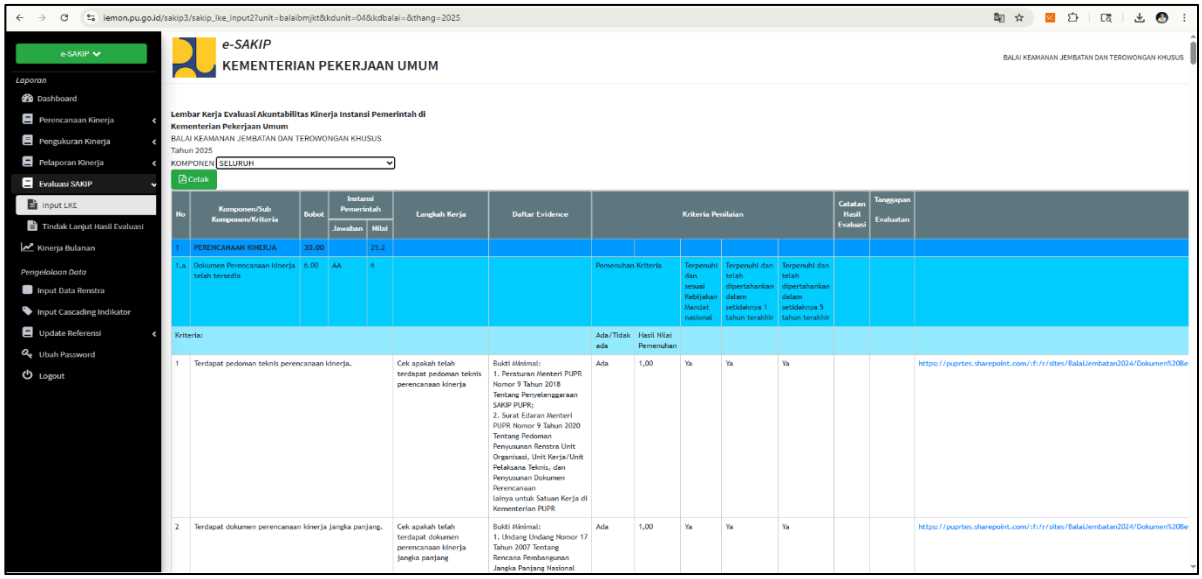

BAB III
PENUTUP

3.1 Tindak Lanjut Terhadap Capaian Realisasi Bulan Februari 2026

Tabel 3.1 Tindak Lanjut Kendala di Bulan Sebelumnya

No	Output	Kendala Bulan Sebelumnya	Rencana Tindak Lanjut	Tindak Lanjut yang Telah Dilaksanakan
1.	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Realisasi pelaporan keuangan atas beberapa kegiatan baru dapat dilaksanakan pada Bulan Februari 2026	Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pelaporan keuangan.	Telah dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pelaporan keuangan sehingga realisasi anggaran dapat dibukukan pada Bulan Februari 2026.
2.	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan	Realisasi pelaporan keuangan atas beberapa kegiatan baru dapat dilaksanakan pada Bulan Februari 2026.	Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pelaporan keuangan.	Telah dilakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pelaporan keuangan sehingga realisasi anggaran dapat dibukukan pada Bulan Februari 2026
3.	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan	Realisasi pelaporan keuangan belum dapat diselesaikan pada Bulan Januari 2026.	Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pelaporan keuangan.	Seluruh proses administrasi dan pelaporan telah diselesaikan pada Bulan Februari 2026.
4.	Layanan Perkantoran	Realisasi pelaporan keuangan belum dapat diselesaikan pada Bulan Januari 2026.	Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pelaporan keuangan.	Seluruh proses administrasi dan pelaporan telah diselesaikan pada Bulan Februari 2026.
5.	Pengelolaan Kepegawaian	Realisasi pelaporan keuangan belum dapat diselesaikan pada Bulan Januari 2026.	Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pelaporan keuangan.	Seluruh proses administrasi dan pelaporan telah diselesaikan pada Bulan Februari 2026.
6.	Penyelenggaraan Zona Integritas, Manajemen Risiko dan SMAP	Realisasi pelaporan keuangan belum dapat diselesaikan pada Bulan Januari 2026.	Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian pelaporan keuangan.	Seluruh proses administrasi dan pelaporan telah diselesaikan pada Bulan Februari 2026.

3.2 Kendala/Permasalahan Bulan Februari 2026

Berdasarkan hasil evaluasi Bulan Februari 2026, seluruh kegiatan memperoleh interpretasi **Sangat Memuaskan**, meliputi:

- Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan
- Layanan Umum
- Layanan Perkantoran
- Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan
- Advis dan Layanan Teknis Jembatan dan Terowongan Jalan
- Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan
- Administrasi Kegiatan Satker Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan

Khusus
- Pengelolaan Kepegawaian
- Penyelenggaraan Zona Integritas, Manajemen Resiko Dan SMAP
- Uang Makan dan Lembur PNS dan PPPK
- Operasional Perkantoran
- Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya
- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Kendala/Permasalahan
Tidak terdapat kendala maupun permasalahan pada pelaksanaan seluruh kegiatan selama Bulan Februari 2026. Seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana kerja dan realisasi pelaporan keuangan telah diselesaikan tepat waktu sehingga seluruh *output* memperoleh interpretasi **Sangat Memuaskan**.

3.3 Faktor Pendukung Keberhasilan

Keberhasilan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dalam melaksanakan pekerjaan di Bulan Februari 2026 didukung oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal, diantaranya;

1. Perencanaan kegiatan yang aktual serta didukung oleh perencanaan anggaran yang baik sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
2. Peran aktif pimpinan dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan serta mengambil keputusan secara cepat dan tepat terhadap setiap permasalahan yang muncul.
3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dikendalikan dan ditingkatkan secara terus-menerus.
4. Koordinasi yang baik antara unit pelaksana, pengelola keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan sehingga proses pelaksanaan kegiatan maupun pelaporan keuangan berjalan tepat waktu.
5. Komitmen seluruh pegawai dalam menyelesaikan administrasi dan pelaporan keuangan sehingga realisasi anggaran dapat tercapai secara optimal.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal 2026

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARMEN ADEKRISTI
Jabatan : KEPALA SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ROY RIZALI ANWAR
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 30 JANUARI 2026

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
ROY RIZALI ANWAR	ARMEN ADEKRISTI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan		**IKP : Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan**	
		IKK : Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100.00 %
		Rincian Output	
	ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya		**IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)**	
Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis		IKK : Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87.05 %
		Rincian Output	
	EBA.962	Layanan Umum	1.00 Layanan
	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan

Kegiatan:	Anggaran:
1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Rp. 5,690,182,000
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga	Rp. 2,749,459,000
Total Anggaran:	**Rp. 8,439,641,000**

JAKARTA, 30 JANUARI 2026

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA	KEPALA SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
ROY RIZALI ANWAR	ARMEN ADEKRISTI

Rekapitulasi Output. Hal. 1 dari 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						8,439,641	Total Anggaran
Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan						5,690,182	
	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan					5,690,182	
	ABF.001.Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan				5,690,182	
			404 Advis dan Layanan Teknis			2,305,583	
		1.00 Laporan		AA PEMANTAUAN DAN EVALUASI JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	1,821,054	
		1.00 Laporan		AB ADVIS DAN LAYANAN TEKNIS JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	484,529	
			405 Layanan Data Dan Informasi			3,384,599	
		1.00 Laporan		AA DUKUNGAN TEKNIS KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	3,384,599	

Lampiran Catatan Kaki. Hal. 1 dari 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya						2,749,459	
	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)					2,749,459	
	EBA.962.Layanan Umum	1.00 Layanan				123,958	
			235 Penyusunan Laporan Keuangan Bmn			123,958	
				AD ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER BALAI JEMBATAN	KOTA BANDUNG	54,403	
				AE PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	KOTA BANDUNG	3,811	
				AF PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MANAJEMEN RESIKO DAN SMAP	KOTA BANDUNG	65,744	
	EBA.994.Layanan Perkantoran	1.00 Layanan				2,625,501	
			001 Gaji dan Tunjangan			330,060	
				AG UANG MAKAN DAN LEMBUR PNS DAN PPPK	KOTA BANDUNG	330,060	
			002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,295,441	
				AH OPERASIONAL PERKANTORAN	KOTA BANDUNG	269,060	
				AI LANGGANAN DAYA DAN JASA OPERASIONAL LAINNYA	KOTA BANDUNG	1,557,680	
				AJ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	KOTA BANDUNG	468,701	

Lampiran Catatan Kaki. Hal. 2 dari 2

MANUAL INDIKATOR KINERJA
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1	**145.GA - PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS**				
	7698 - Kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
	SK 02.04.01	Meningkatnya Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	IKK 05	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	$TSRB_{PL} = \left(\frac{RBT_R}{RBT_T} x100\% + \frac{LTAF_R}{LTAF_T} X100\%\right)$ Keterangan: *TSRBPL = Tingkat kinerja pelayanan keteknikan jalan dan jembatan (%)* *RBTR = Realisasi kegiatan pengembangan teknologi jalan/ jembatan yang diteksanakan (dokumen)* *RBTT = Target kegiatan pengembangan teknologi jalan/ jembatan yang direncanakan (dokumen)* *LTAFR = Realisasi tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitasi pengujian dan advis teknis (nilai)* *LTAFT = Target tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitasi pengujian dan advis teknis (nilai)* *Khusus Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tidak melaksanakan pengembangan teknologi, sehingga hanya diukur dari tingkat kepuasan layanan*
2	**145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN**				
	7756 - Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga				
	SK 06.01.01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK 05	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)

Jakarta, 30 Januari 2026

Direktur Jenderal Bina Marga

Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Roy Rizali Anwar

Armen Adekristi

2. Surat/Nota Dinas Rencana Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP TA 2025

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBANGUNAN JEMBATAN
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
Jl. A.H. Nasution No. 264 Bandung 40294, Surel bkjtk@pu.go.id

NOTA DINAS

NOMOR KU0601/T/Bkjtk/2026/88.2

Yth. : Plt. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Dari : Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus
Hal : Penyampaian Rencana Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Tahun Anggaran 2025
Tanggal : 22 Mei 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Nomor PR0304/B/Bp/2026/185 tanggal 23 April 2026 hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun Anggaran 2025 dan Nomor PR 0304/B/Bp/2026/336 tanggal 22 Mei 2026 hal Tindak Lanjut atas Penyampaian Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Unit Kerja/UPT dan Satuan Kerja Unit Kerja/UPT di Direktorat Jenderal Bina Marga, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut

1. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi AKIP Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2025 dapat dikategorikan **Memuaskan (A)** dalam pengertian bahwa terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level Eselon IV/Pengawas, dengan pencapaian nilai **87,00%**, dengan rincian komponen dan bobot berikut

NO	KOMPONEN	BOBOT / NILAI MAKSIMAL (%)	NILAI HASIL EVALUASI TA 2025 (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	25,20
2	Pengukuran Kinerja	30	26,70
3	Pelaporan Kinerja	15	13,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**100**	**87,00**

2. Dari hasil…

-2-

3. Dari hasil penilaian diatas, terdapat rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut

KRITERIA EVALUASI	REKOMENDASI
A. Perencanaan Kinerja	Menginventarisir bukti dukung perencanaan kinerja berupa berita acara, lembar asistensi, serta dokumen persuratan anggaran yang telah disusun.
B. Pengukuran Kinerja	Menginventarisir bukti dukung pengukuran kinerja berupa undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi rapat terkait pembahasan capaian kinerja yang telah disusun.
C. Pelaporan Kinerja	Menganalisis peningkatan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	1. Menjaga konsistensi peningkatan kinerja setiap tahunnya; 2. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya.

4. Adapun rencana tindak lanjut dan waktu penyelesaian tindak lanjut atas hasil evaluasi Implementasi AKIP Tahun Anggaran 2025 pada Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus (*terlampir*).
5. Selanjutnya, tindak lanjut tersebut akan dipantau dan dilaporkan dalam laporan monitoring dan evaluasi kinerja bulanan Tahun Anggaran 2026.

Atas perhatian Ibu kami ucapkan terimakasih.

Kepala Balai
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Armen Adekristi

Tembusan:
Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

-3-

Lampiran Nota Dinas Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus
Nomor : KU0601/T/Bkjtk/2026/88.2
Tanggal : 22 Mei 2026

Jadwal Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Implementasi AKIP TA 2025

No	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2025	Rencana Tindak Lanjut	Jadwal Pelaksanaan Tahun 2026																																							
			Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt				Nov				Des			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Menginventarisir bukti dukung perencanaan kinerja berupa berita acara, lembar asistensi, serta dokumen persuratan anggaran yang telah disusun	Akan kami inventarisir bukti dukung perencanaan kinerja berupa berita acara, lembar asistensi, serta dokumen persuratan anggaran yang telah disusun									■																															
2	Menginventarisir bukti dukung pengukuran kinerja berupa undangan, absensi, notulen, dan dokumentasi rapat terkait pembahasan capaian kinerja yang telah disusun	Akan kami inventarisir bukti dukung pengukuran kinerja berupa undangan, absensi, notulensi, dan dokumentasi rapat terkait pembahasan capaian kinerja yang telah disusun										■																														

-4-

No	Rekomendasi Atas Evaluasi Implementasi SAKIP TA 2025	Rencana Tindak Lanjut	Jadwal Pelaksanaan Tahun 2026																																							
			Mar				Apr				Mei				Jun				Jul				Agt				Sept				Okt				Nov				Des			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
3	Menganalisis peningkatan/ penurunan capaian dari tahun sebelumnya	Akan kami analisis peningkatan/penurunan capaian dari tahun sebelumnya											■																													
4	1. Menjaga konsistensi peningkatan kinerja setiap tahunnya 2. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya	Akan kami jaga konsistensi peningkatan kinerja setiap tahunnya dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kinerja di tahun selanjutnya												■																												

Kepala Balai
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Armen Adekristi

3. **Lembar Kendali Matriks Kesesuaian Outline dan Muatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan**

Matriks Kesesuaian dan Muatan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan

No	Outline	Muatan	Kesesuaian Outline	Kesesuaian Muatan	Keterangan	Status Tanggal	Paraf
1	**Pendahuluan**						
1.1	Latar Belakang	Pada subbab ini diuraikan esensi penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan	✓	✓			
1.2	Tugas dan Fungsi	Pada subbab ini diuraikan *history* suatu instansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tugas dan fungsi diuraikan berdasarkan peraturan perundang-undangan	✓	✓			
		Tugas	✓	✓			
		Fungsi	✓	✓			
1.3	Struktur Organisasi	Subbab ini diisi dengan bagan struktur organisasi mengacu pada peraturan	✓	✓			

No	Outline	Muatan	Kesesuaian Outline	Kesesuaian Muatan	Keterangan	Status Tanggal	Paraf
		perundang-undangan yang berlaku. Disajikan dalam bentuk grafis.					
2	**Capaian Kinerja Bulanan**						
2.1	Target Kinerja Bulan ke 2	Ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada bulan tersebut	✓	✓			
2.2	Capaian Target Bulanan	Pada bab ini diuraikan capaian kinerja bulanan dibandingkan dengan targetnya	✓	✓			
2.3	Uraian Singkat Paket Pekerjaan	Berisi uraian paket-paket pekerjaan mulai dari penjelasan paket, progres/capaian, permasalahan/kendala, rencana tindak lanjut serta foto-foto terbaru	✓	✓			
2.4	Progres TL LHE SAKIP TA 2025	Menampilkan progres tindak lanjut evaluasi SAKIP pada triwulan terkait dilengkapi dengan bukti dukung berupa dokumentasi/link bukti dukung	✓	✓			

No	Outline	Muatan	Kesesuaian Outline	Kesesuaian Muatan	Keterangan	Status Tanggal	Paraf
3	**Penutup**						
3.1	TL Kendala Bulan Sebelumnya	Berisikan progress tindak lanjut per *output*/ per paket dari permasalahan yang terjadi di bulan sebelumnya	✓	✓			
3.2	Kendala dan Permasalahan Bulan Februari	Berisikan kendala/ permasalahan per *output* pada bulan ke 2	✓	✓			
3.3	Faktor Pendukung Keberhasilan	Berisikan faktor pendukung yang dimiliki sehingga mendorong keberhasilan capaian	✓	✓			

Bandung, 03 Maret 2026

Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Armen Adekristi